

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DI SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

ERISCA

NIM : 63200437

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta
2024**

Analisis Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Erisca¹, Fauzi Isnaen²

^{1,2}Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail : ¹63200437@bsi.ac.id, ²fauzi.fsn@bsi.ac.id

Abstrak - Kunci keberhasilan pemerintahan suatu negara terletak pada pengelolaan pemerintahan yang efektif. Konsep ini sering dikenal sebagai *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, yang menjadi penilaian utama kinerja pemerintah dalam mengelola negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual diterapkan dalam penyajian laporan keuangan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer melalui wawancara dan analisis dokumen internal, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber online seperti jurnal-jurnal. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Analisis Laporan Keuangan

Abstract - The key to the success of a country's government lies in effective government management. This concept is often known as *good government governance*, which is the main assessment of the government's performance in managing the country. The aim of this research is to evaluate how Government Regulation Number 71 of 2010 concerning accrual-based government accounting standards is applied in the presentation of financial reports at the West Jakarta Administrative City Secretariat. Researchers collected two types of data, namely primary data through interviews and internal document analysis, as well as secondary data obtained from online sources such as journals. Data collection methods include observation, interviews and documentation, with analysis using a qualitative approach. The research results show that the implementation of government accounting standards in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 at the West Jakarta Administrative City Secretariat has fulfilled the stipulated provisions.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Report Analysis

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan untuk memberikan pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut (Siburian, 2022) Dalam standar akuntansi pemerintahan ini, menggunakan *Basic Cash Toward Accrual* (kas menuju akrual) dimana laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti atau penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Siburian, 2022)

Laporan keuangan merupakan sistematika informasi yang disusun relevan dengan kondisi keuangan secara faktual dimana merekam keseluruhan proses alur transaksi yang dikelola dan disusun oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu rentang periode tertentu. Laporan keuangan memiliki fungsi utama sebagai bentuk perbandingan pemasukan yang direalisasikan, pengeluaran yang dilaksanakan, pelimpahan transaksi, maupun pembayaran tagihan menggunakan anggaran yang telah disepakati, mengukur tingkat kondisi keuangan, menjadi parameter dalam pengawasan dan evaluasi, sebagai indikator tingkat efisiensi maupun efektivitas entitas yang melaporkan serta bermanfaat dalam pelaksanaan ketentuan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumentasi informasi

finansial suatu perusahaan, instansi, atau entitas pemerintahan untuk periode akuntansi tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan kinerja keuangan entitas tersebut. Secara sederhana, laporan keuangan merupakan catatan penting yang mencakup semua transaksi dan posisi kas perusahaan. Waktu pembuatan laporan keuangan ditentukan oleh kebutuhan masing-masing entitas, bisa dilakukan setiap akhir tahun atau dalam interval waktu tertentu.

Jenis-jenis laporan keuangan Menurut Kasmir (2019) terdapat lima jenis laporan mengenai keuangan yang secara umum biasa disusun oleh suatu entitas yaitu:

a. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca merupakan hasil laporan keuangan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu. Dengan kata lain posisi keuangan yang dimaksud adalah jenis dan jumlah dari aktiva (aset atau harta) dan pasiva (utang dan modal) suatu entitas.

b. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai keuangan tahunan yang memperlihatkan kinerja entitas selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan berapa total penghasilan dan sumber perolehan penghasilan. Di dalam laporan ini juga menunjukkan jumlah beban-beban operasi maupun non operasi yang dibayarkan pada periode akuntansinya.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan tentang keuangan yang memuat berapa total serta jenis modal pada pergantian waktu tertentu. Laporan ini juga menjabarkan fluktuasi modal perusahaan & penyebabnya. Laporan ini sebisa mungkin disajikan dengan jelas dan lengkap untuk menunjukkan kenyataan ekonomi bahwa perusahaan masih beroperasi dan eksistensinya tetap ada.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan tentang keuangan yang mengungkapkan banyak aspek kegiatan entitas baik secara langsung maupun tidak secara langsung mempengaruhi kas entitas.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) adalah laporan mengenai keuangan entitas yang memberikan informasi jika terdapat laporan yang membutuhkan penjelasan lebih rinci secara khusus.

2. Akuntansi Pemerintahan

Fungsi akuntansi pemerintahan adalah menyediakan laporan yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintahan, serta membantu manajemen

dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Tiga tujuan akuntansi pemerintahan (Napitupulu, 2021) adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah.

b. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

SAP berbasis akrual, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikembangkan dari PP SAP sebelumnya (PP Nomor 24 Tahun 2005), dengan mengacu pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut (BPK, 2010), Komponen-komponen laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. belanja;
3. transfer;
4. surplus/defisit-LRA;
5. pembiayaan;
6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. kas dan setara kas;
2. investasi jangka pendek;
3. piutang pajak dan bukan pajak;
4. persediaan;
5. investasi jangka panjang;
6. aset tetap;
7. kewajiban jangka pendek;

8. kewajiban jangka panjang;

9. ekuitas.

c. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional ;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4. Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. “SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah.” (Napitupulu, 2021)

Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, kewajiban, dan ekuitas.

b. Nilai Historis

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar.

c. Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

d. Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

e. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

f. Periodisitas

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan dibagi menjadi beberapa periode. Periode utama yang digunakan^{a)} adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

g. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh^{b)} pengguna.

h. Penyajian Wajar

Faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen^{c)} keuangan. Ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan^{d)} pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Keabsahan Data

Metode penelitian kualitatif dalam menguji keabsahan data menggunakan :

Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Beberapa aktivitas yang dilakukan peneliti dalam uji *credibility* yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, waktu), analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check

Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam uji *transferability* Peneliti akan memberikan uraian yang jelas, sistematis, dan rinci terhadap hasil pemeriksaan agar penelitian mudah dipahami oleh orang lain.

Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Peneliti melakukan audit dengan cara berkonsultasi dengan dosen pembimbing supaya mengurangi kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian.

Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2015) memaparkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sendari, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan apakah sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berjalan dengan efektif.

Jenis & Sumber Data Penelitian

Jenis & sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah :

Data Primer : Merupakan data yang dikumpulkan didapat langsung dari tangan pertama atau sumbernya.

Data Sekunder : Merupakan data yang didapat secara tidak langsung seperti data melalui media sebagai perantara seperti jurnal-jurnal dan buku-buku.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, mengunduh (mendownload) jurnal dan data yang sudah dibuat oleh instansi langsung.

Metode Pengolahan Data / Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer (langsung) atas peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian (Kantor Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menggunakan metode menurut Miles and Huberman, (Zulfirman, 2022) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 Tahun 2010.

No	Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 Tahun 2010	Laporan Keuangan Kantor Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
1.	Laporan Realisasi Anggaran a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Pembiayaan f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Laporan Realisasi Anggaran a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit LRA e. Pembiayaan f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
2.	Neraca a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas	Neraca a. Aset b. Kewajiban c. Ekuitas
3	Laporan Operasional a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional b. Beban dari kegiatan operasional c. Pos luar biasa, bila ada d. Surplus/defisit-LO	Laporan Operasional a. Pendapatan-LO b. Beban c. Pos Luar Biasa d. Surplus/defisit-LO
4.	Laporan Perubahan Ekuitas a. Ekuitas Awal b. Surplus/defisit LO c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas d. Ekuitas Akhir	Laporan Perubahan Ekuitas a. Ekuitas Awal b. Surplus/defisit LO c. Koreksi Ekuitas d. Ekuitas Akhir

Sumber : Bendahara umum bagian keuangan Setko Adm. JB

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan pengungkapan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran harus memiliki unsur-unsur seperti berikut.

- Pendapatan-LRA
- Belanja
- Transfer
- Surplus/defisit LRA
- Pembiayaan
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Dalam hal ini Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyajikan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

2. Neraca

Setiap entitas pelaporan harus mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang dalam neraca. Neraca hanya menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada laporan neraca yang dibuat oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki format penyajian yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Pada laporan operasional menyajikan pos – pos sebagai berikut :

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- Beban dari kegiatan operasional
- Pos luar biasa, bila ada
- Surplus/defisit-LO

Pada Laporan operasional yang dibuat oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat telah sesuai standar akuntansi pemerintah PP No 71 Tahun 2010.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada laporan perubahan ekuitas menyajikan pos – pos sebagai berikut :

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO
- Koreksi-koreksi ekuitas
- Ekuitas akhir

Pada Laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat telah sesuai standar akuntansi pemerintah PP No 71 Tahun 2010.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa :

1. Prosedur akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengelola keuangannya secara transparan, efisien, dan akuntabel.
2. Secara keseluruhan, laporan keuangan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sudah memberikan informasi yang cukup informatif bagi para pengambil keputusan.
3. Pengelolaan keuangan yang dilakukan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai ketentuan kebijakan aturan yang berlaku, serta laporan keuangan telah disusun dengan benar, tepat waktu, lengkap, dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ada. Dapat dikatakan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

REFERENSI

- BPK. (2010). *Komponen PP No.71 Tahun 2010*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Napitupulu, E. A. S. (2021). *Tinjauan Atas Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PP No.71 Tahun 2010)*.
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5306>
- Sendari, A. A. (2021). *pengertian metode deskriptif kualitatif*.
<https://www.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?page=4>
- Siburian, N. J. . (2022). *Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga*.
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6828>
- Zulfirman, R. (2022). *IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN*.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/11758>